

Penerapan *Sustainable Livelihood Assessment* (SLA) dalam Menyusun Rencana Aksi Perhutanan Sosial: Studi Kasus di Desa Sidorejo, Kenduruan, Tuban

Dhina Mustikaningrum^{1*}, Sulistyani Eka Lestari¹, Hery Prasetyo¹, Maimunah¹, Kristiawan¹

¹Universitas Sunan Bonang, Jln. dr. Wahidin Sudirohusodo 798 Tuban Telp. (0356) 322025

*Email : dhina.mustikaningrum@gmail.com

ABSTRACT: *The forest management system in Tuban Regency refers to government forestry regulations which aim to achieve equality and development based on social justice for all Indonesian people through the Social Forestry program. one of the social forestry practices with a forestry partnership scheme is in Sidorejo Village. This research aims to develop a social forestry action plan using the Sustainable Livelihood Assessment (SLA) approach. During the SLA process, LMDH members analyze forest areas, institutions, capital or assets owned, problems and develop priority action plans. The SLA topic related to community life is the entry point for LMDH Wonorejo, Sidorejo Village, Tuban Regency to understand the problems of implementing forestry partnerships in their area. The SLA results show that problems related to members' human resources and finances are two fundamental things that must be accommodated in preparing a social forestry action plan. The prioritization results show that LMDH has made the Nganget Warm Springs tourism development program a priority for its social forestry action plan to increase the members' welfare.*

Key words: *Action Plan, Community Forestry, Forestry Partnership, Social Forestry*

DOI: <http://dx.doi.org/10.24259/jhm.v11i2.8177>

1. PENDAHULUAN

Sistem pengelolaan hutan di Kabupaten Tuban mengacu pada regulasi kehutanan pemerintah yang bertujuan untuk mewujudkan pemerataan dan pembangunan yang berbasis keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu program di ranah kehutanan yang mendukung tujuan tersebut adalah program Perhutanan Sosial (Tasya Moedy Agusti, 2019). Program Perhutanan sosial sendiri merupakan perwujudan Nawacita Presiden yang ketujuh yakni mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Sebagaimana diketahui bahwa perhutanan sosial bertujuan untuk pemerataan ekonomi masyarakat dan mengurangi

ketimpangan sektor ekonomi melalui tiga pilar, yakni lahan, pemberian kesempatan usaha, dan sumber daya manusia.

Perhutanan sosial merupakan mekanisme pengelolaan kawasan hutan yang memberikan ruang bagi rakyat Indonesia untuk mengelola kawasan hutan negara seluas 12,7 juta hektar. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021, Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau Hutan Hak/Hutan Adat yang dilaksanakan oleh Masyarakat Setempat atau Masyarakat Hukum Adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat dan kemitraan kehutanan (Pemerintah Republik Indonesia, 2021).

Perhutanan sosial juga mencakup upaya penanaman hutan di lahan milik pribadi seperti hutan rakyat, hutan milik atau hutan keluarga maupun hutan adat serta pengelolaan hutan kerjasama perusahaan swasta dan masyarakat. Perhutanan sosial memberikan peran dan hak masyarakat atas pengelolaan sumber daya hutan yang memadukan kegiatan perlindungan, kesejahteraan masyarakat lokal, dan tujuan produksi yang berkelanjutan (Arifandy & Sihalo, 2016).

Praktik perhutanan sosial memberikan dampak positif pada penurunan laju perambahan hutan atau deforestasi hingga 50% dan memperbaiki ekonomi kelompok usaha perhutanan sosial (Mutaqin et al., 2022). Meski demikian, hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa perhutanan sosial belum mampu meningkatkan ekonomi masyarakat yang tampak dari pertumbuhan usaha bahkan belum efektif menurunkan laju deforestasi. Penyebabnya adalah kapasitas sumber daya pengelola hutan belum memadai, belum terintegrasinya program hutan sosial dengan program desa, kurangnya kualitas perencanaan pengelolaan hutan dan intervensi kebijakan yang belum optimal (Mulyana & Moeis, 2022). Hal ini menjadikan pentingnya memperkuat implementasi

kebijakan dan kemitraan yang saling mendukung untuk meningkatkan kapasitas pengelola hutan, khususnya di tingkat desa.

Supriyanto & Nuryanto (2023) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam program perhutanan sosial menjadi bagian dalam upaya mengoptimalkan tata kelola perhutanan sosial. Masyarakat menjadi aktor penting dalam keberhasilan program perhutanan sosial. Namun kecenderungan yang terjadi adalah keterbatasan sumberdaya manusia yang memadai, khususnya masyarakat sekitar hutan. Contoh kasus semacam ini ditemukan di Desa Sidorejo Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban. Desa ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 2.416 jiwa (Badan Pusat Statistik, 2021). Berdasarkan data monografi desa, Persentase penduduk miskin di Desa Sidorejo adalah sejumlah 35 persen dari total penduduk atau sekitar 846 jiwa, dimana sebagian besar tinggal di sekitar hutan. Sebagian besar dari mereka memiliki pendidikan terakhir tingkat sekolah menengah pertama. Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) perlu didampingi dalam menjalin kemitraan dengan Perum Perhutani sebagai pengelola kawasan tersebut. Keberadaan kelompok tani maupun LMDH di tingkat desa perlu dikuatkan sebagai upaya pemberdayaan kelompok masyarakat (Mustikaningrum, 2023).

Sumanto (2009) menyampaikan bahwa salah satu pendekatan atau metode yang dikenal efektif dalam mewujudkan masyarakat berdaya adalah *Sustainable Livelihood Assessment* (SLA). SLA menganalisa kebutuhan masyarakat yang meliputi kemampuan, aset-aset kehidupan sehari-hari dan kegiatan yang dibutuhkan untuk sarana hidup (Saputra et al., 2019). Metode ini dapat dipertimbangkan untuk diterapkan mengingat bahwa perhutanan sosial erat kaitannya dengan perikehidupan masyarakat secara berkelanjutan, yang sangat mungkin masyarakat menolak program tersebut jika tidak menjanjikan keberlanjutan hidup masyarakat (Moeliono et al., 2017). Perikehidupan bermasyarakat ini meliputi aset sumberdaya alam, sumberdaya manusia, fisik, ekonomi (finansial) dan sosial (Bhaduri et al., 2018). Gai et al., (2020) menyatakan bahwa pendekatan berbasis analisis aset seperti SLA menjadikan

masyarakat sebagai subyek yang melakukan sendiri analisis kebutuhannya (Riyanti & Raharjo, 2021). Melalui pendekatan *Sustainable Livelihood Assessment*, penyusunan rencana aksi perhutanan sosial dapat lebih holistik dan berkelanjutan, dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan yang saling terkait dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan menjaga keberlanjutan sumberdaya alam.

2. METODOLOGI PENELITIAN

2.1. Waktu dan Tempat

Penelitian dilaksanakan pada Oktober 2022 hingga Februari 2023. Penelitian mengambil lokasi di Desa Sidorejo Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Wonorejo Desa Sidorejo sebagai kelompok yang melakukan penyusunan rencana aksi perhutanan sosial. Pemilihan lokasi tersebut atas dasar rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten Tuban. Ijin program perhutanan sosial dengan skema Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (Kulin KK) bagi LMDH Wonorejo Desa Sidorejo telah diberikan melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tentang Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (SK Kulin KK) Nomor: 7444/MenLHK-PSKL/PKPS/PSL0/4/2019.

2.2. Pengumpulan Data dan Analisis Data

Pengumpulan data penelitian dilaksanakan melalui *focus group discussion* (FGD) dan wawancara sebagai bagian dari pendekatan *Sustainable Livelihood Assessment* (SLA). Topik yang diangkat dalam asesmen ini adalah: 1). Pemetaan Kawasan hutan; 2). Analisis Kelembagaan; 3). Analisis Lima Modal yakni: modal sumberdaya alam, sumberdaya manusia, fisik, finansial dan sosial; dan 4). Penyusunan Rencana Aksi.

Data sekunder juga dikumpulkan khususnya terkait dengan profil desa dimana LMDH Wonorejo menjadi bagian dari organisasi masyarakat yang ada

di tingkat desa. Seluruh data yang dikumpulkan melalui metode pengumpulan data baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif dianalisis secara deskriptif.

Tabel 1. Variabel pengamatan, deskripsi data dan metode pengumpulan

Variabel	Deskripsi Data	Sumber dan Metode Pengumpulan Data
Modal Sumberdaya alam (SDA)	Kepemilikan lahan, produktivitas lahan, sumberdaya air, jasa lingkungan	FGD dan wawancara (SLA)
Modal sumberdaya manusia (SDM)	Pendidikan, kesehatan, pengetahuan, keahlian, tenaga kerja, kemandirian	Data sekunder dan wawancara (SLA)
Modal fisik	Sarana dan prasarana, alat produksi, aksesibilitas	FGD dan wawancara (SLA)
Modal Finansial	Pendapatan, pengeluaran, tabungan, hutang dan hutang, dukungan	Data sekunder dan wawancara (SLA)
Modal sosial	Organisasi masyarakat, partisipasi, gotong royong, kekeluargaan, jejaring sosial	FGD dan wawancara (SLA)

(Wijayanti et al., 2016)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pemetaan Kawasan Hutan

Berdasarkan data tipologi tapak Perhutani KPH Jatirogo, LMDH Wonorejo Desa Sidorejo memiliki petak pangkuan seluas total 197,5 hektar dari luas total Desa Sidorejo. Wilayah LMDH ini berada di Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Bangilan yang meliputi 2 (dua) Resort Pangkuan Hutan (RPH), yakni RPH Karanggeneng dan RPH Kejuron. Wilayah kelola LMDH Wonorejo Desa Sidorejo berada di area perbukitan dengan kelerengan berkisar antara 15% - 40%. Dengan demikian maka berdasarkan tingkat kelerengan, pertanian intensif dan pertanian sangat intensif di wilayah LMDH Wonorejo Desa Sidorejo tidak direkomendasikan.

Salah satu bentuk kemitraan kehutanan yang sudah terjalin di kawasan tersebut adalah pengelolaan wisata air hangat Nganget yang tertuang dalam Perjanjian Kerjasama antara Perum Perhutani KPH Jatirogo dengan LMDH Sidorejo Nomor 01/Bang-BisJTR/DivreJatim/2020. Kemitraan ini potensial meningkatkan ekonomi LMDH mengingat bahwa jumlah pengunjung Wisata Air Hangat Nganget yang relatif banyak. Berdasarkan data dari Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tuban, tercatat jumlah wisatawan yang mengunjungi Wisata Air Hangat Nganget pada Tahun 2018 sebanyak 183.528 orang, pada tahun 2019 tercatat 189.619 orang dan Tahun 2020 (sampai dengan bulan Oktober), pengunjung Wisata Air Hangat Nganget sebanyak 60.203 orang. Penurunan terjadi karena di Tahun 2020 sektor pariwisata adalah salah satu sektor yang mendapatkan dampak dari Covid-19 yang membatasi mobilitas masyarakat.

Membangun ekowisata berbasis perhutanan sosial terbukti mampu memberikan nilai tambah bagi perekonomian masyarakat sekitar hutan (Simanjuntak et al., 2022). Apalagi saat ini telah terjadi pergeseran konsep pariwisata ke model ekowisata wisatawan mengalami kejenuhan terhadap obyek wisata buatan (Abdoellah et al., 2019).

3.2 Analisis Kelembagaan

Hasil SLA mengungkapkan bahwa LMDH Sidorejo dibentuk oleh Kepala Desa Sidorejo pada tahun 2019 untuk mendukung keberhasilan program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Pembentukan LMDH Sidorejo didasarkan pada Surat Keputusan Kepala Desa Sidorejo Nomor 188.45/14/KPTS/414.401.08/2019. Periode kepengurusan LMDH Sidorejo sebagaimana surat keputusan tersebut adalah dari tahun 2019 sampai 2025 terhitung sejak tanggal 3 Oktober 2019. Oleh karena itu, Perhutani dan Pemerintah Desa adalah dua Lembaga yang menjadi mitra utama LMDH Wonorejo Desa Sidorejo.

Di samping dua Lembaga tersebut di atas, hasil SLA menunjukkan bahwa terdapat beberapa Lembaga lain yang memiliki pengaruh dan peran

masing-masing bagi pengembangan LMDH. Lembaga tersebut adalah Lembaga yang terkait dengan kepariwisataan mengingat bahwa LMDH memiliki Kerjasama kemitraan dengan Perum Perhutani berupa Pengelolaan Wisata Nganget.



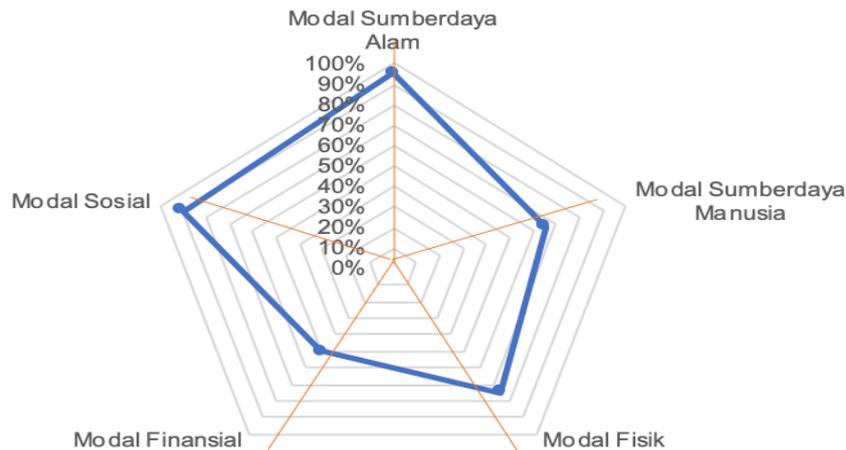
Gambar 1 Proses Analisis Kelembagaan dalam Pendekatan *Sustainable Livelihood Assessment (SLA)* di LMDH Sidorejo

Berdasarkan hal tersebut di atas, LMDH Wonorejo Desa Sidorejo menyusun daftar Lembaga yang terkait dengan pengembangan LMDH, yakni: BAPPEDA Kabupaten Tuban, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tuban, Perum Perhutani KPH Jatirogo, Pemerintah Desa Sidorejo, Pemerintah Kecamatan Kenduruan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tuban, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban. Keseluruhan Lembaga tersebut diharapkan mampu membawa perubahan khususnya peningkatan ekonomi anggota LMDH.

3.3 Analisis Lima Modal

Hasil analisis lima modal menunjukkan bahwa modal sumberdaya alam dan modal sosial merupakan dua modal terkuat yang dimiliki oleh LMDH Wonorejo Desa Sidorejo. Hal ini tampak dari jaring laba-laba yang disusun oleh LMDH Wonorejo Desa Sidorejo. Kekayaan alam dan obyek wisata alam

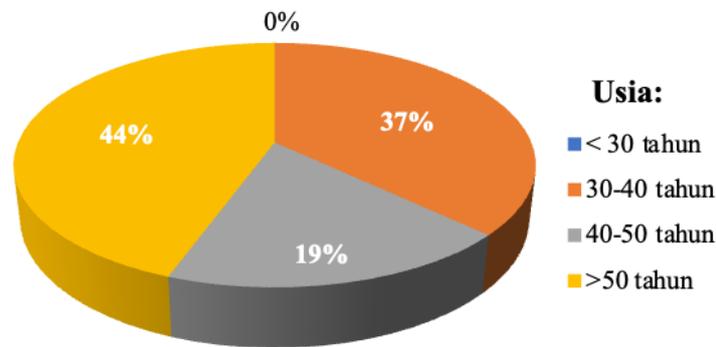
yang dimiliki mereka memiliki potensi besar dalam peningkatan perekonomian. Kegotong royongan juga masih menjadi kekuatan besar bagi warga desa untuk menyelesaikan persoalan bersama.



Gambar 2 Jaring Laba-laba Hasil Analisis Lima Modal LMDH Wonorejo

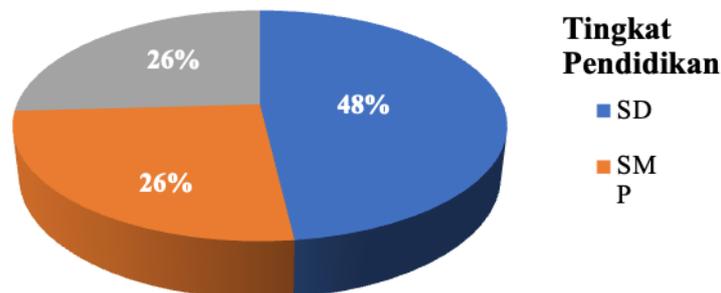
Modal sosial penting dalam proses pendampingan perhutanan sosial. Penerapan modal sosial yang baik mampu memberdayakan masyarakat dan sangat berpengaruh dalam keberhasilan pendampingan perhutanan sosial (Supriyanto & Nuryanto, 2023). Modal sosial ini meliputi norma sosial, budaya gotong royong, dan jejaring sosial (Ainiyah et al., 2020).

Berdasarkan hasil SLA, mata pencaharian anggota umumnya adalah petani. Mereka tinggal tersebar di semua dusun di Desa Sidorejo, yakni Dusun Mojo, Dusun Karanggeneng dan Dusun Sidorejo. Sebaran usia anggota LMDH Sidorejo bervariasi namun didominasi usia di atas 40 (empat puluh) tahun. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi proses pemberdayaan masyarakat desa hutan, karena ada kecenderungan sosial bahwa mereka yang berusia di atas 50 (lima puluh) tahun menyerahkan segala keputusan kelompok kepada mereka yang berusia lebih muda.



Gambar 3 Sebaran Usia Anggota LMDH Sidorejo

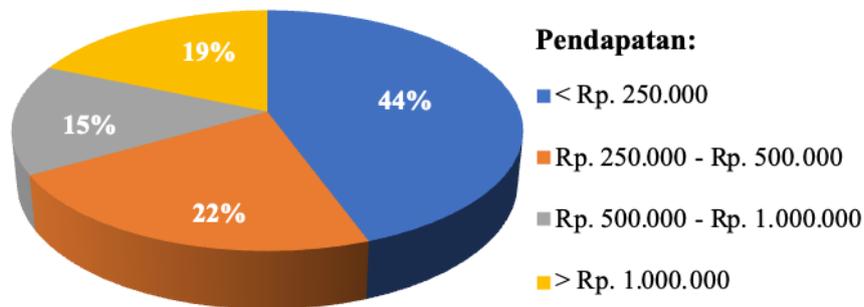
Terkait dengan modal SDM, hasil SLA menunjukkan terdapat beberapa kelemahan, khususnya Pendidikan. Tingkat pendidikan anggota LMDH mayoritas lulusan Sekolah Dasar (SD), yakni 48 persen dari keseluruhan anggota. Sisanya lulusan SMP sebanyak 26 persen dan lulusan SMA juga sebanyak 26 persen. Gambaran tersebut mencerminkan bahwa terdapat kelemahan dari segi Sumber Daya Manusia (SDM). Hal ini diakui oleh Perum Perhutani KPH Jatirogo sebagai tantangan tersendiri bagi KPH Jatirogo dalam mendorong LMDH menjalin kemitraan dengan pihak lain. Salah satu contoh adalah inisiatif LMDH dalam menyusun proposal kemitraan.



Gambar 4 Sebaran Tingkat Pendidikan Anggota LMDH Sidorejo

Tingkat pendidikan umumnya berpengaruh terhadap pendapatan seseorang (Susanto & Pangesti, 2019). Sehingga wajar jika modal finansial

LMDH untuk menjalankan skema perhutanan sosial menjadi tantangan tersendiri. Sebanyak 44 persen dari anggota LMDH Sidorejo memiliki pendapatan bulanan kurang dari Rp. 250.000,-, disusul kemudian 22 persen di antaranya memiliki pendapatan per bulan Rp. 250.000,- sampai dengan Rp. 500.000,- . Jika dilihat dari Garis Kemiskinan (GK) Kabupaten Tuban kondisi tahun 2019 sebesar Rp. 348.503,- per kapita per bulan, maka sebagian besar anggota LMDH Sidorejo termasuk dalam kategori masyarakat miskin.



Gambar 5 Tingkat Pendapatan Anggota LMDH Sidorejo

Dipandang dari perspektif tingkat keterlibatan perempuan, anggota LMDH Sidorejo belum memberikan ruang partisipasi aktif bagi perempuan dalam kegiatan terkait pengelolaan hutan. Hal ini terlihat dari keikutsertaan perempuan dalam kegiatan SLA, dimana hanya 2 (dua) peserta perempuan yang mengikuti kegiatan mewakili suaminya. Terkait dengan perhutanan sosial, keterlibatan perempuan penting dalam tata kelola Kawasan, tata kelola kelembagaan dan tata kelola usaha, namun umumnya keterlibatan tersebut masih rendah (Mukrimaa et al., 2016). Kelemahan utama keterlibatan Perempuan ini umumnya ditemukan pada tingkat pendidikan dan karakteristik sosial yang menyebabkan perempuan cenderung merasa tidak diperlukan partisipasinya dibandingkan laki-laki (Aspita, 2021).

3.4 Penyusunan Rencana Aksi

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sendiri mengarahkan kelompok atau lembaga tersebut agar dapat memanfaatkan pola kemitraan kehutanan dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan setempat. Terdapat 3 (tiga) jenis usaha yang potensial dikembangkan oleh LMDH Sidorejo, yakni:

1) Pengembangan Wisata Pemandian Air Hangat Nganget

Secara administrasi, Wana Wisata Pemandian Air Hangat Nganget (selanjutnya disebut Wisata Nganget) terletak di Dusun Mojo, Desa Sidorejo, Kecamatan Kenduruan, Kabupaten Tuban. Sedangkan dalam peta kawasan hutan Perum Perhutani KPH Jatirogo, Wisata Nganget berada di Petak 33B dan 34F RPH Kejuron BKPH Bangilan. Wisata Nganget secara resmi dibuka tahun 2007 dan merupakan rintisan wanawisata yang dikelola bersama oleh Perhutani Kesatuan Pemangkuan (KPH) Jatirogo dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Wonorejo Desa Sidorejo Tuban.

2) Pengembangan Agroforestri (wanatani)

Pengembangan yang dimaksudkan dalam hal ini adalah menemukan alternatif komoditas tanaman semusim untuk dipadukan dengan tanaman tahunan atau tanaman pokok yang harus dipertahankan di kawasan Perhutani. Saat ini, seluruh anggota LMDH menanam jagung di bawah tanaman jati. Menemukan jenis tanaman untuk menggantikan jagung atau sebagai rotasi jagung yang lebih bernilai ekonomi adalah fokus pengembangan agroforestry ini. Selain berorientasi pada peningkatan nilai ekonomi, jenis komoditas yang dipadukan dengan jati adalah jenis yang tahan terhadap naungan sehingga tidak mengganggu tutupan lahan di atasnya.

3) Silvopastura

Silvopastura adalah bentuk agroforestri yang menggabungkan kegiatan kehutanan dan peternakan dalam satu sistem pengelolaan lahan. Kegiatan silvopastura sebetulnya sangat bermanfaat bagi ekologi karena umumnya

dilakukan menanam pakan ternak di sela-sela tanaman pokok. Namun hal ini harus didukung dengan kepemilikan ternak oleh LMDH. Selain menanam pakan ternak, silvopastura juga memungkinkan untuk menempatkan jenis ternak tertentu di tengah hutan produksi.

Di antara tiga rencana aksi tersebut, selama proses SLA, LMDH menyusun prioritas rencana aksi. Prioritas program implementasi rencana aksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan (Perhutanan Sosial) menggunakan metode ELI (*Eligible, Leveraging, Impact*). Unsur –unsur yang memenuhi kriteria ELI adalah sebagai berikut:

- *Eligible*: Program dapat diimplementasikan dan memenuhi kelayakan secara teknis, sinergi dengan program pemerintah dan layak secara ekonomi, ekologi dan sosial.
- *Leveraging*: Ada pembagian peran dan partisipasi aktif dari LMDH dalam melaksanakan implementasi rencana aksi. Selain itu, ada sumberdaya LMDH yang disumbangkan guna melaksanakan implementasi program.
- *Impact*: Memberikan dampak besar, dalam hal ini meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan anggota LMDH Sidorejo.

Tabel 2. Hasil Analisis ELI

Rencana Aksi dan Opsi Kegiatan	Skor <i>Eligible</i>	Skor <i>Leveraging</i>	Skor <i>Impact</i>	Total Skor
Pengembangan Wana Wisata Nganget	8	7	9	24
- Penambahan wahana wisata				
- Penambahan sarana pengelolaan sampah				
- Perbaikan jalan masuk				
- Pengadaan parkir				
- Peningkatan kualitas PJU				
Pengembangan Agroforestry	7	7	8	22
- Penanaman jahe merah				
- Pengadaan bibit porang				
- Pengadaan koperasi tani				
Pengembangan Silvopastura	6	6	6	18
- Pengadaan bibit sapi				

Sumber: Analisis Hasil SLA

Berdasarkan hasil analisis tersebut, maka LMDH mengambil kesimpulan bahwa kemitraan kehutanan dalam pengelolaan wisata air hangat Nganget adalah prioritas rencana aksi yang harus dikembangkan. Pertimbangan ini diambil karena pengembangan ekowisata ini diharapkan mampu memperbaiki modal ekonomi lembaga dan masyarakat.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil *Sustainable Livelihood Assessment* (SLA), implementasi perhutanan sosial dengan skema kemitraan kehutanan antara LMDH Sidorejo dengan Perum Perhutani KPH Jatirogo mengalami persoalan terkait sumberdaya manusia dan kemampuan finansial organisasi. Namun LMDH Jatirogo memiliki modal sosial dan jejaring kelembagaan yang dapat dioptimalkan. Berdasarkan hasil proses prioritas rencana aksi perhutanan sosial, LMDH mengajukan program pengembangan wisata Pemandian Air Hangat Nganget sebagai prioritas rencana aksi perhutanan sosial.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada LMDH Wonorejo Desa Sidorejo yang menjadi mitra pelaksanaan penelitian. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada BAPPEDA Kabupaten Tuban yang mendukung pelaksanaan program penyusunan rencana aksi perhutanan sosial yang dilaksanakan di LMDH Wonorejo Desa Sidorejo Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdoellah, O. S., Sunardi, Widianingsih, I., Cahyandito, M. F., Wiyanti, D. T., & Nurseto, H. E. (2019). Pengembangan Ekowisata Berbasis Masyarakat Di Desa Tarumajaya , Hulu Sungai Citarum: Potensi Dan Hambatan. *Kumawula : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3), 236–247.
- Ainiyah, N., Kaskoyo, H., & Qurniati, R. (2020). Modal manusia dan modal sosial dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan di Kesatuan Pengelolaan Hutan Pematang Neba Kabupaten Tanggamus. *Prosiding Seminar* <http://repository.lppm.unila.ac.id/25865/>

- Arifandy, M. I., & Sihaloho, M. (2016). Efektivitas Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat Sebagai Resolusi Konflik Sumber Daya Hutan. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 3(2). <https://doi.org/10.22500/sodality.v3i2.11339>
- Aspita, S. (2021). Peran Perempuan dalam Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (Studi Kasus di Desa Mekar Mandiri Kabupaten Sintang). *Piper*, 17, 1–23.
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Kabupaten Tuban dalam Angka 2021*. <http://tubankab.bps.go.id>
- Baynes, J., Herbohn, J., Smith, C., Fisher, R., & Bray, D. (2015). Key factors which influence the success of community forestry in developing countries. *Global Environmental Change*, 35, 226–238. <https://doi.org/10.1016/J.GLOENVCHA.2015.09.011>
- Bhaduri, S., Sinha, K. M., & Knorrington, P. (2018). Frugality and cross-sectoral policymaking for food security. *NJAS - Wageningen Journal of Life Sciences*, 84, 72–79. <https://doi.org/10.1016/j.njas.2017.08.002>
- Gai, A. M., Poerwati, T., Maghfirah, F., & Sir, M. M. (2020). Analysis of Sustainable Livelihood level and its Influence on Community Vulnerability of Surumana Village, Central Sulawesi. *Journal of Regional and Rural Development Planning*, 4(3), 209–220. <https://doi.org/10.29244/jp2wd.2020.4.3.209-220>
- Moeliono, M., Thuy, P. T., Bong, I. W., Wong, G. Y., & Brockhaus, M. (2017). Social Forestry - why and for whom? A comparison of policies in Vietnam and Indonesia. *Forest and Society*, 1(2), 78–97. <https://doi.org/10.24259/FS.V1I2.2484>
- Mukrimaa, S. S., Nurdyansyah, Fahyuni, E. F., YULIA CITRA, A., Schulz, N. D., غسان, د., Taniredja, T., Faridli, E. Miftah., & Harmianto, S. (2016). Peran Perempuan dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) Dongo Baru Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 6 (August), 128.
- Mulyana, & Moeis, J. P. (2022). *Dampak program perhutanan sosial terhadap pertumbuhan usaha dan deforestasi: bukti empiris dari Indonesia* (Vol. 11, Issue 1).

- Mustikaningrum, D. (2023). Strengthening Farmer Organization for Smallholder Farmers. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1131(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1131/1/012001>
- Mutaqin, D. J., Wahyuni, I., & Rahayu, N. H. (2022). Analisis Kegiatan Perhutanan Sosial dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat Pasca Pandemi Covid-19. *Bappenas Working Papers*, 5(2), 159–175. <https://doi.org/10.47266/bwp.v5i2.135>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2021). Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial. In *Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan*.
- Riyanti, C., & Raharjo, S. T. (2021). Asset Based Community Development Dalam Program Corporate Social Responsibility (Csr). *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 3(1), 112. <https://doi.org/10.24198/jkrk.v3i1.32144>
- Rohmayanto, Yanto., Nurfatriani, Fitri., & Kurniawan, A. Setiadi. (2019). Skala Usaha Ekonomis Perhutanan Sosial : Studi Komparasi pada Agroforestry dan Ekowisata di Yogyakarta dan Nusa Tenggara Barat. *Penelitian Sosial Dan Ekonomi Kehutanan*, 16(1), 55–80.
- Saputra, R. M. K. L. W., Wijayanti, W. P., & Dinanti, D. (2019). Kajian Penghidupan Berkelanjutan (Sustainable Livelihood) di Kelurahan Pasawahan, Kabupaten Bandung. *Planning for Urban Region and Environmen*, 8(3), 265–274.
- Simanjuntak, R., Simanjuntak, R., Wangka, N., & Manik, E. (2022). Membangun Ekowisata Berbasis Perhutanan Sosial Di Desa Talaga Paca, Kabupaten Halmahera Utara. *Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(6), 1617–1623. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v6i6.12167>
- Sumanto, S. E. (2009). Kebijakan Pengembangan Perhutanan Sosial Dalam Perspektif Resolusi Konflik [Social Forestry Development Policy in Conflict Resolution Perspective]. *Forestry Policy Analysis Journal*, 6, 13–25.
- Supriyanto, B., & Nuryanto, I. (2023). Pengaruh Modal Sosial terhadap Pendampingan Perhutanan Sosial di Provinsi Maluku. *Jurnal Hutan Dan Masyarakat*, 15(1), 14–31. <https://doi.org/10.24259/jhm.v15i1.26059>

- Susanto, R., & Pangesti, I. (2019). Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Kemiskinan di DKI Jakarta. *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 5(4), 340. <https://doi.org/10.30998/jabe.v5i4.4183>
- Tasya Moedy Agusti. (2019). *Implementasi Regulasi Tentang Perhutanan Sosial yang Berkemanfaatan Bagi Masyarakat Desa di Sekitar Hutan: Studi di Wilayah Hukum KPH Probolinggo Divisi Regional Jawa Timur*. Universitas Brawijaya.
- Wigati, S., & Fitrianto, A. R. (2013). Pendekatan Sustainable Livelihood Framework Dalam Rangka Membongkar Dominasi Tengkulak Melalui Kegiatan Keagamaan: Study Kasus Pada Pendampingan. *Jurnal Dakwah: Media Komunikasi XIV(2)*, 283–310. <http://ejournal.uin-suka.ac.id/dakwah/jurnaldakwah/article/view/284>
- Wijayanti, R., Baiquni, M., & Harini, R. (2016). Strategi Penghidupan Berkelanjutan Masyarakat Berbasis Aset di Sub DAS Pusur, DAS Bengawan Solo. *Jurnal Wilayah Dan Lingkungan*, 4(2), 133–152. <https://doi.org/10.14710/JWL.4.2.133-152>